

KHAWATIR GANGGU KEUANGAN DAERAH Pemkot Bekasi Tak Ajukan Usulan Formasi ASN 2023

BEKASI (IM) - Pemkot Bekasi tidak mengusulkan pengajuan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2023. Alasannya karena khawatir mengganggu keuangan daerah.

"Pemkot Bekasi dalam tahap mempelajari kembali kebutuhan pegawai dan ketersediaan anggaran sehingga tidak mengganggu fiskal keuangan yang telah direncanakan. Untuk itu sementara ini Pemkot Bekasi tidak mengusulkan formasi ASN 2023 berdasarkan pertimbangan itu," kata Pj Sekretaris Daerah, Junaedi dalam keterangannya, Jumat (2/6).

Junardi mengatakan, Pemkot Bekasi tetap akan melakukan pengangkatan ASN apabila keadaan fiskal sudah berimbang. Sayangnya, dia tidak menjelaskan kapan akan dibuka kembali. "Apabila keadaan fiskal sudah berimbang dan memungkinkan untuk pengangkatan ASN, maka kita akan kembali mengusulkan Formasi Pengangkatan ASN," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Bekasi, Nadih menuturkan, sejumlah pertimbangan tidak dibukanya usulan formasi ASN. Salah satunya Pemkot Bekasi lebih mengedepankan perluasan jangkauan dan peningkatan mutu pelayanan publik yang paling dibutuhkan masyarakat, utamanya pendidikan dan kesehatan.

"Konsekuensinya dalam keterbatasan APBD 2023 sementara waktu tidak mengusulkan formasi pengangkatan ASN tahun ini untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Kita lebih memilih mengoptimalkan SDM aparatur yang ada saat ini," tuturnya.

Selain itu Pemkot Bekasi sejauh ini juga sudah mengangkat ASN (status P3K) yang banyak di antaranya 911 orang diangkat P3K pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada tahun 2022 dengan SK tahun 2023 juga telah diangkat 1.828 orang. Adapun sebanyak 285 SK P3K Kesehatan telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Bulan Agustus 2023 ini akan diangkat dan diserahkan 1.313 SK. Pada bulan September/Oktober 2023 ini akan diserahkan 230 SK P3K Damkar. "Seiring dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang mendalam, usulan formasi akan dibuat bila memang kurang jumlahnya dan tersedia anggarannya," ujarnya.

Senada dengan hal Junardi, Nadih juga memastikan formasi ASN untuk tahun 2024 tetap terbuka selama pendapatan APBD naik dan analisa menunjukkan adanya kebutuhan formasi. "Bagi kami fokus optimalisasi ASN yang ada dan mengangkat honorer TU TTK menjadi ASN-P3K menjadi penting dan relevan, sejauh memang pendapatan dalam APBD 2023-2024 ini meningkat drastis. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



PAMERAN DEEP AND EXTREME INDONESIA 2023

Pengunjung mencoba pelatihan menyelam secara gratis pada Pameran Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2023 di Hall B Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (2/6). Ajang pameran internasional olahraga air, olahraga ekstrim dan kegiatan luar ruang tersebut berlangsung 1-4 Juni 2023.

BPBD DKI Antisipasi Potensi Banjir Rob Akibat Bulan Purnama

Pihak BPBD DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan BMKG, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan para lurah terkait kesiapan personel dan peralatan seperti pompa mobile dan stasioner untuk siap difungsikan menyedot air rob.

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi banjir

rob yang diprediksi bakal melanda Jakarta pada pekan ini hingga 8 Juni mendatang. Sebelumnya, BMKG memprediksi gelombang pasang air

laut akan melanda beberapa kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa termasuk Jakarta pada 1-8 Juni. Hal ini disebabkan oleh fenomena bulan purnama pada 3 Juni dan perigee (titik terdekat Bulan dengan Bumi) pada 6 Juni mendatang. Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BMKG, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan para lurah terkait kesiapan personel dan peralatan seperti

pompa mobile dan stasioner untuk siap difungsikan menyedot air rob.

"Kami memberikan informasi dinamika kondisi tinggi gelombang laut melalui tautan bpbdd DKI Jakarta.go.id/gelombanglaut, media sosial, Whatsapp Group dan Channel Telegram," ujar Michael saat dihubungi, Jumat (2/6).

Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel Petugas Penanggulangan Bencana/Tim Reaksi Cepat (TRC) di kelurahan yang rawan rob, dengan dukungan personel dari

organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

"Lokasi penungsian serta sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir yang berada di kelurahan rawan banjir rob seperti perahu, ring buoys, jaket pelampung juga siap untuk difungsikan untuk membantu masyarakat apabila dibutuhkan," tuturnya.

BPBD DKI juga siap memberikan layanan kedaruratan 24 jam melalui Jakarta Siaga 112 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat. ● yan



FOTO: ANT

LATIHAN BEBAS BALAPAN FORMULA E 2023 JAKARTA

Sejumlah pembalap melaju dalam sesi latihan bebas pada balapan Formula E 2023 Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Jumat (2/6).

Manajemen Ancol Minta Penonton Formula E Pakai Kendaraan Umum

JAKARTA (IM) - Manajemen Taman Impian Jaya Ancol mengimbau warga yang ingin menonton lomba balap motor listrik Formula E yang berlangsung pada 3-4 Juni di sirkuit Ancol, Jakarta Utara untuk memakai kendaraan umum.

Manajemen Ancol dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (2/6), menyebutkan pemegang tiket Formula E tidak bisa memasuki gerbang Ancol menggunakan kendaraan pribadi tapi bisa menggunakan bus antar jemput (shuttle bus) yang telah disediakan.

Pemegang tiket Formula E Jakarta yang membawa kendaraan pribadi akan diarahkan panitia penyelenggara untuk memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan.

Tempat parkir yang disiapkan oleh panitia penyelenggara salah satunya di Lapangan Benyamin Suaeb Kemayoran, Jakarta Pusat memiliki kapasitas 1.500 kendaraan. Dari Kemayoran, panitia penyelenggara mengangkut penonton Formula E menggunakan bus antar jemput secara gratis.

Selain itu ada pula kantong parkir yang berada di Jakarta International Stadium (JIS) dengan kapasitas 1.200 kendaraan dan juga kantong parkir cadangan di Hailai Ancol jika tempat parkir sentral Kemayoran dan kantong parkir JIS penuh.

Informasi titik parkir penonton Formula E bisa diakses melalui laman <https://jakartaeprix.goersapp.com/>.

Semua akses masuk bagi pemegang tiket Formula E dipusatkan di pintu Gerbang Timur Ancol dan hanya digunakan khusus untuk bus antar-jemput saja.

Jika memaksa masuk dengan kendaraan pribadi,

maka pemegang tiket Formula E itu akan diarahkan ke akses pengunjung reguler Ancol di pintu Gerbang Barat (Hailai) dan juga Pintu Gerbang Selatan.

Di sana, pemegang tiket Formula E yang memaksa masuk menggunakan kendaraan pribadi akan dikenakan biaya tiket masuk kawasan Ancol sebagaimana pengunjung reguler, yakni Rp25.000 per orang dan juga tambahan 20.000 untuk pengguna sepeda motor dan Rp30.000 untuk pengguna mobil.

Ada banyak transportasi umum yang dapat menjadi pertimbangan bagi penonton Formula E untuk ke Ancol, di antaranya TransJakarta koridor V, KRL jurusan Kota-Tanjung Priok, angkutan umum ataupun juga dengan taksi dan ojek daring.

Di dalam kawasan Ancol, pengunjung bisa menggunakan Bus Wara Wiri dan Kereta Sato-Sato untuk berkeliling secara gratis, atau bisa juga menyewa motor listrik. Taman Impian Jaya Ancol tetap beroperasi seperti biasa mulai pukul 06.00 - 24.00 WIB.

Formula E di Ancol, Jakarta Utara akan menjadi format balapan dua hari (double-header) perdana di Indonesia dengan total putaran (lap) untuk Round 10 pada Sabtu sebanyak 36 lap dan untuk Round 11 pada Minggu sebanyak 38 lap.

Balapan Sabtu (3/6) dimulai dengan latihan bebas pada pukul 09.10 WIB dan dilanjutkan kualifikasi pukul 10.40 WIB. Sedangkan Round 10 sendiri dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Balapan Minggu dimulai dengan latihan bebas pada pukul 08.10 WIB, kualifikasi berikutnya pada pukul 10.40 WIB, dan Round 11 pada pukul 15.00 WIB. ● yan

DPRD DKI Panggil Dinas Sosial Terkait KJP Plus Yang Jadi Temuan BPK

JAKARTA (IM) - DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta terkait dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU) yang selama ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Kita panggil untuk melakukan koordinasi terkait temuan tersebut," kata anggota komisi E DPRD DKI, Merry Hotma, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/6).

Menurut Merry, dana KJP Plus tidak tersalurkan lantaran pihak Dinas Sosial dan Kementerian Sosial

memberlakukan metode baru dalam menyalurkan KJP Plus kepada warga yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Merry menjelaskan pemegang KJP Plus tahun ini bisa tidak mendapatkan bantuan jika di dalam RW yang sama ada warga yang jauh lebih membutuhkan.

"Contoh, Amir tahun 2022 terdaftar sebagai DTKS, tau-tau di RT yang sama ada yang lebih tidak mampu dari dia, maka Amir gugur deh tuh tidak masuk DTKS padahal tahun lalu dia menerima," kata dia.

Dengan demikian, jelas

Merry, akibat dari perubahan sistem tersebut pada akhirnya mempengaruhi penerimaan KJP Plus berikutnya.

Selain itu, Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta juga menemukan permasalahan pendistribusian dana dari Bank DKI kepada pemegang KJP Plus dan KJMU. Maka dari itu, dalam waktu dekat juga akan meminta keterangan kepada Bank DKI.

Sebelumnya, BPK RI mengungkapkan adanya temuan dana sebesar Rp197,55 miliar pada anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus

dan KJMU.

"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan," kata Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan

senilai Rp6,38 miliar.

"Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta," katanya.

Kemudian ada juga denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar.

"Atas permasalahan tersebut dana telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14,66 miliar," kata Supit.

Walau ada temuan tersebut, tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ● yan

TERKAIT PERKARA GUGATAN MEREK POLO RALPH LAUREN

PT Manggala Putra Perkasa Memohon Perlindungan Hukum ke Menko Polhukam RI

JAKARTA (IM) - PT Mandala Putra Perkasa (MPP) meminta perlindungan hukum kepada Menko Polhukam RI Prof.Dr.H Mahfud MD atas perkara gugatan penghapusan 14 sertifikat merek yang sah.

Gugatan penghapusan itu dilakukan Mohindar HB yang mengaku memiliki daftar mereknya (yang sebenarnya) telah dihapus atau tidak berlaku untuk menggugat pihak PT MPP. "Surat permohonan memohon perlindungan hukum kepada Menko Polhukam RI itu sudah kami ajukan minggu ini," kata juru bicara PT MPP, Denny Tjung kepada media, Kamis (1/6).

"Kasus ini sudah masuk pengadilan niaga Jakarta Pusat dan putusan kasasi memerintahkan menghapus merek kami, Polo Ralph Laurens," kata Denny.

"Ini berdampak pada kelangsungan usaha kami yang telah berlangsung puluhan tahun, juga berdampak sosial ekonomi terhadap nasib ribuan karyawan kami," kata Denny mewakili perusahaan yang membawahi PT Polo Ralph Laurens Indonesia.

Latar Belakang

Bagaimana bisa penggugat yang tidak mempunyai merek dapat menggunakan Merek Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren yang sudah dihapus pada 1995 melalui putusan pengadilan dan putusan Kasasi pada 2021. Ini dialami logo orang menunggak kuda yang tercantum di produk kaos ternama Polo dengan merk



Juru Bicara PT PRLI dan PT MPP, Denny Tjung didampingi Hasan, F. Faisal, Franky. Y. Madani dan Janli Sembiring, Kamis (1/6), di Jakarta.

dagang Polo by Ralph Lauren. "Namun, ternyata sejak 1986 ada sengketa merek yang cukup populer tersebut, dengan oknum warga Mohindar HB selaku pemegang pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran merk 173934 di Dirljen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemendikham) menggugat merk dagang Polo by Ralph Lauren yang digunakan perusahaan produksi kaos Polo di Indonesia yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) dan pemegang Merk Polo lainnya dari PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) serta atas nama Fahmi Babra," ujar Juru Bicara (Jubir) PT PRLI dan PT MPP, Denny Tjung didampingi Hasan, F. Faisal, Franky. Y. Madani dan Janli Sembiring, Kamis (1/6), di Jakarta.

Ia menjelaskan, gugatan

Mohindar HB dengan alat bukti Pokok Perkara diputus sudah tidak berlaku lagi/dihapus yakni Merk Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dengan putusan nomor 140/PDT.G/1995/PN.JKT.PST pada 18 Agustus 1995 dan Putusan Kasasi nomor 3101 K/Pdt/1999 pada 14 Juni 2001.

Kemudian Mohindar HB kembali menggugat PT PRLI, PT MPP, Fahmi Babra dan Dirljen HAKI pada 22 Agustus 2022 dan diputuskan menang oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakpus dengan nomor perkara 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 365 K/Pdt Sus-HKI/2023.

Lalu di tingkat pertama Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 83/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 465 K/Pdt Sus-HKI/2023 serta di tingkat pertama Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Kasasi dengan nomor putusan 614 K/Pdt Sus-HKI/2023.

"Nah, ini yang cukup menggelitik kami, ada banyak keajnggalan dalam putusan tersebut. Bagaimana bisa gugatan Mohindar HB yang tidak mempunyai merek dapat menggunakan Merek Daftar 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren yang sudah dihapus pada 1995 melalui putusan pengadilan dan putusan Kasasi pada 2021. Tidak memiliki legal standing/tidak sah/tidak ada sertifikat bisa menggugat kami selaku perusahaan dan pemilik merek yang sah?," jelas Denny.

Ia juga menyebutkan, pihaknya tidak bisa menerima

putusan tersebut dan akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dan juga melaporkan adanya dugaan unsur Pidana ke Mabes Polri serta meminta permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas perkara gugatan merek Polo by Ralph Lauren ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

"Maka, saya pertanyakan bagaimana mungkin kami dikalahkan dari tingkat Pertama PN Jakpus hingga tingkat Kasasi di MA menggunakan merek yang sudah dihapus 173934 di Dirljen HAKI. Kami tidak bisa menerima selaku pemegang sertifikat 14 merek yang sah Polo by Ralph Lauren dari dua perusahaan PT PRLI dan PT MPP serta pemegang tiga merek atas nama Fahmi Babra yang sudah terdaftar resmi di Dirljen HAKI Kemendikham," ucap Denny.

Denny menegaskan, perusahaan yang sudah melakukan bisnis atau kegiatan usaha selama puluhan tahun yang legal sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan terancam dengan putusan tersebut dan akan berdampak bagi ribuan karyawan di seluruh Indonesia.

"Artinya, jika putusan tersebut dijalankan akan berdampak pada nasib ribuan karyawan, mitra kerja dan hilangnya kontribusi penerimaan pajak negara akibat kemungkinan akan berhentinya operasional toko-toko Polo Ralph Lauren di seluruh Indonesia," ujarnya. ● yan